

## ABSTRAK

**Fatin, Hasyim Asyari, 2013, 06210091, Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Keluarga Poligami di Kecamatan Kanigaran-Probolinggo. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Suwandi, M. Hi.**

***Kata Kunci : Perlindungan Anak, Keluarga Poligami***

Tanggung jawab terhadap pemeliharaan seorang anak merupakan tanggung jawab semua pihak sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Namun demikian, orang tua lah yang merupakan pihak pertama yang harus bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan itu. Melihat pada peraturan ini, penulis tertarik untuk meneliti implementasi aturan di atas dalam kenyataan riil di lapangan, dalam hal ini adalah keluarga poligami di Kecamatan Kanigaran-Probolinggo. Ketertarikan penulis dilatarbelakangi oleh sebuah asumsi bahwa keluarga poligami telah memberikan kesibukan tersendiri terutama bagi seorang ayah dalam hal pemenuhan nafkah maupun perhatian terhadap seorang anak.

Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti memfokuskan pada tiga persoalan pokok dalam penelitian ini. Pertama, tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami di Kecamatan Kanigaran-Probolinggo. Kedua, faktor-faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami di Kecamatan Kanigaran-Probolinggo. Ketiga, upaya penanggulangan terhadap hambatan yang terjadi dalam keluarga Poligami di Kecamatan Kanigaran-Probolinggo.

Dengan demikian, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian hukum empiris (sosiologis), tentu saja data-data yang dibutuhkan berupa data yang diperoleh secara langsung dari lapangan (primer) berupa peristiwa hukum dari masyarakat khususnya keluarga poligami dan perlindungan anak dalam keluarga tersebut. Data tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap para informan yang telah ditentukan.

Dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan diperoleh beberapa kesimpulan. Terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami di masyarakat Kanigaran Kota probolinggo, berdasarkan pandangan dari para informan meliputi perlindungan dalam hal pendidikan dan biaya hidup, bahkan uniknya, tanggung jawab orang tua terhadap biaya hidup mereka berlangsung hingga seorang anak melangsungkan pernikahan. Sedangkan mengenai faktor penghambatnya, pertama, maraknya praktek poligami yang tidak mengikuti aturan main undang-undang (baca: poligami bawah tangan). Kedua, kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang tentang perkawinan. Adapun upaya penanggulangannya adalah perlunya memberikan penyadaran kepada masyarakat yang *notabenenya* *fiqh oriented* menuju masyarakat yang berperadaban yuridis-formalis. Selain itu adalah sosialisasi yang intens terhadap aturan-aturan perkawinan maupun aturan tentang perlindungan anak sebagaimana dimuat dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002.